



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 16 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
UNIT KERJA : BADAN KEUANGAN DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : AGUNG JOKO WIYARSO
2. Jabatan : KEPALA BIDANG
3. NHK : 820689

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **2.360.000.000**

1. Tanah Seluas 500 m2 di KAB / KOTA SUKOHARJO, HASIL SENDIRI Rp. 310.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 400 m2/100 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, WARISAN Rp. 2.050.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **542.000.000**

1. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000
2. MOTOR, HONDA C70 Tahun 1978, HASIL SENDIRI Rp. 7.500.000
3. MOTOR, HONDA C70 Tahun 1978, HASIL SENDIRI Rp. 12.500.000
4. MOTOR, VESPA PX 150 Tahun 1985, WARISAN Rp. 5.000.000
5. MOTOR, YAMAHA NMAX Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 21.500.000
6. MOBIL, NISSAN GRAND LIVINA Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000
7. MOBIL, TOYOTA INNOVA Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 319.000.000
8. MOTOR, VESPA SPRINT Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 49.500.000



9. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp.
7.000.000

10. MOTOR, KAWASAKI NINJA RR / KR 150 K Tahun 2010, HASIL
SENDIRI Rp. 35.000.000

11. MOTOR, YAMAHA MIO SPORTY Tahun 2007, HASIL SENDIRI
Rp. 6.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 78.500.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 120.251.120

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 3.100.751.120

III. HUTANG Rp. 141.072.300

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 2.959.678.820

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.